



**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Jakarta, Maret 2022

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

1. Pendahuluan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi oleh Setjen Wantannas. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Setjen Wantannas dalam rangka mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta pihak terkait lain

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPBE Tahun 2021 ini disusun dengan maksud memberikan gambaran tentang kondisi penerapan dan capaian pelaksanaan SPBE selama kurun waktu tahun 2021 beserta hasil review dan kekurangan dari berbagai indikator dan domain.

Sementara itu tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut dan rencana aksi serta akselerasi yang diperlukan untuk dapat mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di lingkungan Setjen Wantannas.

3. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- c. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana;
- d. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola SPBE di Lingkungan Setjen Wantannas;
- f. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi SPBE Tahun 2021;
- g. Keputusan Menteri PANRB Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021; dan
- h. Surat Perintah Nomor OT.05/28/2022 tanggal 5 Januari 2022 perihal Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 di Lingkungan Setjen Wantannas.

4. Metodologi Evaluasi SPBE

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Sebagaimana tertera pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, evaluasi penilaian SPBE Tahun 2021 terdiri dari struktur dibawah ini:

- a. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai, terdiri dari Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen, dan Domain Layanan;
- b. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Secara rinci struktur penilaian tersebut tergambar pada tabel dibawah ini:

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

Secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara untuk akselerasi pencapaian birokrasi berkelas dunia. Di samping itu, secara khusus SPBE ditempatkan pada area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE.

Adapun predikat penilaian SPBE ditentukan dari nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dan dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada tabel dibawah ini:

No	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik ^{*)}
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

^{*)} Target penilaian : Predikat baik (Indeks minimal 2,6)

5. Kondisi Aktual dan Hasil Evaluasi SPBE 2021

Melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, Kementerian PANRB telah merilis hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pelaksanaan SPBE Tahun 2021 untuk seluruh K/L dan Pemda. Adapun Setjen Wantannas mendapatkan nilai sebesar **2,42** (kategori cukup). Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019, dimana Setjen Wantannas mendapatkan nilai sebesar 2,11 (kategori cukup). Adapun pada tahun 2020, Setjen Wantannas tidak diikuti dalam penyelenggaraan evaluasi SPBE, karena pelaksanaan evaluasi SPBE tahun 2020 ini hanya dilaksanakan terhadap 130 K/L/Pemda sebagai implikasi pandemi Covid-19 dan *refocussing* anggaran. Detail hasil penilaian Indeks SPBE Setjen Wantannas tahun 2021 secara rinci terlihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator	Nilai
Domain Kebijakan SPBE		2,90
1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
3	Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
8	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
Domain Tata Kelola SPBE		2,20
11	Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Rencana dan Anggaran SPBE	3

14	Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Layanan Pusat Data	2
17	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
19	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Kolaborasi Penerapan SPBE	3
Domain Manajemen SPBE		1,18
21	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Penerapan Manajemen Data	1
24	Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
Domain Layanan SPBE		2,86
32	Layanan Perencanaan	4
33	Layanan Penganggaran	4
34	Layanan Keuangan	3
35	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Layanan Kepegawaian	3
37	Layanan Kearsipan Dinamis	3

38	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Layanan Data Terbuka	2
44	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Layanan Publik Sektor 1	2
46	Layanan Publik Sektor 2	2
47	Layanan Publik Sektor 3	2
	Total	2,42

6. Rekomendasi dari Evaluator Eksternal dan Kementerian PANRB

Sebagaimana tertuang pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021, Evaluator Eksternal dan Kementerian PANRB menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Dewan Ketahanan Nasional. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Dewan Ketahanan Nasional, sudah dapat menggambarkan predikat CUKUP dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.
- b. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Dewan Ketahanan Nasional adalah pada penerapan aspek Penyelenggaraan SPBE, dan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan. Keunggulan indikator pada Dewan Ketahanan Nasional yaitu pada kebijakan internal yaitu pada kebijakan internal manajemen data, pelaksanaan tim koordinasi SPBE, layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengaduan pelayanan publik.
- c. Namun disisi lain, Dewan Ketahanan Nasional masih terdapat beberapa kelemahan. Pada perencanaan strategi SPBE, meskipun Dewan Ketahanan Nasional telah memiliki Arsitektur SPBE yang tertuang dalam Grand Design Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, namun hanya mencakup kompetensi Data dan Informasi, Kemanan SPBE, dan Aplikasi SPBE, sedangkan Proses Bisnis Pemerintah, Arsitektur SPBE, dan

infrastruktur belum masuk dalam arsitektur SPBE. Demikian pula pada peta rencana SPBE yang belum mencakup Audit TIK. Hal ini pula yang menyebabkan pada Aspek Pelaksanaan audit TIK masih menjadi kelemahan pada penerapan SPBE di Dewan Ketahanan Nasional.

- d. Kelemahan juga terdapat pada aspek penerapan manajemen SPBE, dimana belum terdapat perencanaan (master plan, renstra, peta rencana) kegiatan manajemen dan audit. Kelemahan juga dapat terlihat pada aspek layanan publik, kapabilitas fungsi teknis dari layanan tersebut masih rendah, dimana masih banyak aplikasi publik yang dibangun secara sendiri-sendiri, sehingga tidak memanfaatkan potensi transaksi dan integrasi terhadap layanan SPBE lainnya. Namun hal ini masih dapat dipahami karena Dewan Ketahanan Nasional bukanlah suatu badan yang memiliki tupoksi pelayanan publik.
- e. Aspek Kebijakan internal tata kelola SPBE sudah mencakup semua kebijakan tata kelola SPBE, namun pada kebijakan peta rencana perlu untuk ditingkatkan dengan memasukkan aspek audit TIK. Pada aspek perencanaan strategis SPBE, perlu peningkatan pada Arsitektur dan Peta Rencana, serta proses bisnis SPBE. Arsitektur SPBE pada dewan ketahanan Nasional yang tertuang dalam Grand Design Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional belum mencakup Proses Bisnis pemerintahan, layanan, dan infrastruktur SPBE. Pada aspek Teknologi perlu peningkatan pada Pembangunan Aplikasi SPBE yaitu mengikuti siklus pembangunan aplikasi, tahapan perencanaan, analisa, desain, implementasi, dan pemeliharaan.
- f. Pada aspek penyelenggaraan SPBE sudah diterapkan dengan baik. Pada aspek manajemen SPBE, perlu peningkatan pada Manajemen Risiko SPBE yang telah disusun agar dapat disahkan. Selain itu juga perlu peningkatan pada Penerapan Manajemen Data, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan penerapan manajemen pengetahuan. Aspek pelaksanaan audit TIK merupakan salah satu kelemahan yang perlu menjadi perhatian pada Dewan Ketahanan Nasional. Dewan Ketahanan Nasional telah baik menerapkan layanan Administrasi pemerintahan, namun perlu peningkatan untuk aspek layanan publik sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

7. Strategi dan Rencana Aksi

Sebagai upaya untuk memenuhi target dalam meningkatkan nilai SPBE Setjen Wantannas dari predikat cukup menjadi predikat baik, Tim Koordinasi SPBE yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 82 Tahun 2021 melakukan monitoring dan evaluasi serta menentukan rencana aksi yang relevan untuk dapat dicapai pada tahun selanjutnya. Rencana aksi pada setiap indikator tersebut digambarkan pada tabel dibawah ini:

STRATEGI DAN RENCANA AKSI SPBE

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
1.	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	3	Persesjen No 1 Tahun 2021, pasal 7 tentang Arsitektur SPBE	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	Masih cukup relevan, namun implementasi pada pasal ini adalah perlu segera menyusun Arsitektur SPBE Setjen Wantannas
2.	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	Persesjen No 1 Tahun 2021, yaitu pada Pasal 8 tentang Peta Rencana SPBE	Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, serta hasil harmonisasi SPBE, maka pengaturan tersebut telah memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal namun belum menjelaskan secara lengkap tentang muatan peta rencana SPBE yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit SPBE. Dimana belum menjelaskan mengenai audit.	Melakukan revisi pada persesjen No 1 Tahun 2021 khususnya pada Pasal 8 tentang Peta Rencana SPBE dengan menambahkan klausul: Peta Rencana SPBE Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (...) memuat: a. Tata kelola SPBE; b. Manajemen SPBE; c. Layanan SPBE; d. Infrastruktur SPBE; e. Aplikasi SPBE; f. Keamanan SPBE; dan g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
3.	Kebijakan Internal Manajemen Data	4	Persesjen No 1 Tahun 2021, yaitu pada Pasal 32 tentang Manajemen Data	Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, serta hasil harmonisasi SPBE, maka pengaturan tersebut telah memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal dan telah mengatur rangkaian proses pengelolaan arsitekur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data,	Masih cukup relevan, namun kebijakan ini perlu segera di implementasikan dalam bentuk penyediaan manajemen data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi.
4.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2	Persesjen No 1 Tahun 2021, yaitu pada Pasal 19-22 Tentang Aplikasi SPBE	Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, serta hasil harmonisasi SPBE, maka pengaturan tersebut telah memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal dan telah namun belum mengatur secara lengkap siklus pembangunan aplikasi.	Melakukan revisi pada persesjen No 1 Tahun 2021 khususnya pada Pasal 22 tentang Peta Rencana SPBE dengan menambahkan klausul: Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dibangun dan dikembangkan: a. selaras dengan Arsitektur SPBE Setjen Wantannas; b. sesuai dengan tugas dan fungsi Setjen Wantannas; c. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
					dan fungsi di bidang teknologi dan informasi.
5.	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3	Persesjen No 1 Tahun 2021, pasal 47 tentang Pusat Data	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	Masih cukup relevan, namun kebijakan layanan internal Pusat Data perlu semakin diperkuat dengan menyusun SOP layanan pusat data sesuai dengan perkembangannya
6.	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	Persesjen No 1 Tahun 2021, pasal 15 bagian a) tentang Infrastruktur SPBE dan pasal 17	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	Masih cukup relevan, namun kebijakan ini perlu diperkuat dengan dokumentasi jaringan intra dengan lebih detail dan spesifik
7.	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	Persesjen No 1 Tahun 2021, 15 bagian b) tentang Infrastruktur SPBE	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	Masih cukup relevan
8.	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3	Persesjen No 1 Tahun 2021, pasal 31 tentang Manajemen Keamanan Informasi	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	Masih cukup relevan, namun kebijakan ini perlu diperkuat dengan merevisi dokumen Tata Kelola Keamanan Informasi menyesuaikan dengan perkembangan

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
					teknologi sehingga lebih komprehensif
9.	Kebijakan Internal Audit TIK	3	Persesjen No 1 Tahun 2021, pasal 38 tentang Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	Masih cukup relevan, namun perlu diperkuat dengan penguatan regulasi internal dan SDM Auditor internal
10.	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	Persesjen No 1 Tahun 2021, yaitu pada pasal 42 tentang Penyelenggara SPBE	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	Masih cukup relevan, perlu pembaharuan komposisi Tim Koordinator SPBE jika terdapat mutasi/perpindahan tugas anggota yang ada didalamnya
11.	Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Grand Design Sisfo Tahun 2019-2024	Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung yang disampaikan, serta hasil harmonisasi SPBE, maka dokumentasi arsitektur SPBE belum mencakup seluruh pemenuhan kompetensi sumber daya Manusia SPBE (Kompetensi Dibidang Proses Bisnis pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE) sesuai dengan perencanaan Sumber Daya Manusia yang tertuang dalam Grand Desain Sistem Informasi Keamanan	Menyusun dokumen Arsitektur SPBE Setjen Wantannas yang berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional yang mendeskripsikan unsur-unsur integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
				Nasional. Data dukung yang diberikan hanya mencakup kompetensi Data dan Informasi, Keamanan SPBE, dan Aplikasi SPBE, dan tidak ditemukan adanya penyusunan arsitektur yang sesuai baik framework yang sudah ada atau modifikasi (TOGAF, FEAF, dll).	
12.	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	Grand Design Sisfo Tahun 2019-2024	Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung yang disampaikan, dan hasil harmonisasi SPBE, maka dokumentasi Peta Rencana SPBE belum mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE, yaitu audit Teknologi dan Audit TIK.	Memperkaya unsur-unsur yang terdapat dalam dokumen Grand Design Sisfo Tahun 2019-2024 dengan memuat unsur-unsur Tata kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga sesuai dengan kaidah Peta Rencana SPBE Nasional.
13.	Rencana dan Anggaran SPBE	3	<ul style="list-style-type: none"> • DIPA Tahun 2020 halaman 10 tentang Layanan Data dan Informasi; • RKA-KL Tahun 2020 halaman 15 tentang Layanan Data dan Informasi; 	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	<i>Masih cukup relevan</i>

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
14.	Inovasi Proses Bisnis SPBE	2	Persesjen Wantannas tentang Peta Proses Bisnis.	Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung yang disampaikan, dan hasil harmonisasi SPBE, maka instansi Dewan Ketahanan Nasional sudah memiliki dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku, namun belum menunjukkan telah dilakukan perbaikan pada proses bisnis sebagai bentuk penerapan inovasi Proses Bisnis	Perlu adanya penjelasan mengenai revisi Persesjen Wantannas tentang Peta Proses Bisnis yang memuat sebuah kegiatan yang menggambarkan inovasi yang memanfaatkan peran teknologi dan informasi dalam proses bisnis tersebut. Inovasi proses bisnis dengan pemanfaatan teknologi dan informasi dapat diuraikan sesuai halaman 25 tentang Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-12 Pengelolaan Sistem Informasi.
15.	Pembangunan Aplikasi SPBE	1	Grand Design Sisfo Tahun 2019-2024	Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung yang disampaikan, dan hasil harmonisasi SPBE, maka instansi Dewan Ketahanan Nasional sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE namun belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi secara lengkap mulai dari tahapan perencanaan, analisa, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Juga belum terdapat	Perlu melengkapi evidence pembangunan Aplikasi SPBE yang memenuhi siklus pembangunan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan: <ul style="list-style-type: none"> • Adakah pembangunan aplikasi termuat pada renstra? • Dokumen KAK dan RAB • Notulen rapat - Analisa dan Desain:

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
				notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul dengan unit pengelola TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen KAK dan RAB - Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> • Pemb. aplikasi termuat pada RKA-KL • Laporan pekerjaan aplikasi tsb - Pemeliharaan: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rencana pemeliharaan
16.	Layanan Pusat Data	2	Dokumen 12 SOP Data Center	Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung yang disampaikan, serta hasil harmonisasi SPBE, maka instansi Dewan Ketahanan Nasional sudah memiliki layanan pusat data yang memiliki prosedur pengoperasian baku pusat data, namun belum ada dokumentasi penggunaan pusat data pada seluruh unit.	Perlu dibuat sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa pusat data Wantannas dimanfaatkan oleh unit kerja yang lain. Dokumen tersebut memuat tabel yang berisi nama server, unit kerja, IP Address, Operating System, URL dan fungsi server.
17.	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	Gambar Topologi Jaringan Wantannas	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	<i>Masih cukup relevan</i>

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
18.	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Screen shoot aplikasi pemantauan kegiatan RAN Bela Negara	Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung yang disampaikan, serta hasil harmonisasi SPBE, maka instansi Dewan Ketahanan Nasional telah memiliki dokumentasi aplikasi pemantauan, namun belum menunjukkan adanya penghubung antara layanan	Perlu melengkapi dengan dokumen yang menunjukkan bahwa terdapat integrasi antar aplikasi yang dibuktikan dengan screen shoot API (<i>Application Programming Interface</i>)
19.	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4	Tim Koordinasi SPBE Setjen Wantannas tercantum pada Keputusan Sesjen Wantannas No. 82 Tahun 2021	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	<i>Masih cukup relevan</i>
20.	Kolaborasi Penerapan SPBE	3	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Sesjen Wantannas pada KSP • Surat Menko Polhukam pada Wantannas • Surat Sesjen Wantannas pada Polhukam 	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	Perlu ada penambahan evidence yang menggambarkan kolaborasi dengan K/L atau pihak lain. Contoh bukti kerjasama dengan ILMCI tentang Bela Negara
21.	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2	Draft Manajemen Risiko	Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, serta hasil harmonisasi SPBE,	Perlu adanya penjabaran lebih detail dari aspek Manajemen Risiko yang

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
				<p>maka dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional telah memiliki dokumen Manajemen Risiko SPBE di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional telah mencakup program yang terarah berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No.5 Tahun 2020. Dari form/matriks Manajemen Risiko yang disampaikan, namun belum terlihat perencanaan (master plan, renstra, dan peta rencana) kegiatan manajemen dan audit.</p>	<p>terdapat pada Renstra, KAK, RKA-KL sampai disahkannya Dokumen Persesjen Wantannas tentang Manajemen Risiko</p>
22.	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2	Keputusan Sesjen Wantannas No.58/SK/VI/2012 tentang Pedoman Tata Kelola Keamanan Informasi	<p>Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, serta hasil harmonisasi SPBE, maka dokumentasi Pedoman Tata Kelola Keamanan Informasi di Lingkungan Setjen Wantannas telah selaras dengan arah dan perencanaan programnya serta telah terdokumentasi secara formal dalam Surat Keputusan, namun belum ada bukti dukung yang menunjukkan bahwa</p>	<p>Perlu dilampirkan bukti dukung yang menyatakan bahwa penerapan manajemen keamanan informasi telah dilakukan oleh seluruh unit kerja.</p>

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
				penerapannya dilaksanakan di seluruh unit kerja	
23.	Penerapan Manajemen Data	1	Keputusan Sesjen Wantannas No.58/SK/VI/2012 tentang Pedoman Tata Kelola Keamanan Informasi	Penjelasan ini belum mengacu pada pedoman manajemen data yang dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data. sehingga dapat disimpulkan bahwa belum terdapat perencanaan (master plan, renstra, peta rencana) kegiatan yang berhubungan dengan manajemen data.	Perlu sosialisasi terlebih dahulu dari K/L terkait sebagai langkah awal untuk memahami lebih detail mengenai Manajemen Data
24.	Penerapan Manajemen Aset TIK	1	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara	Berdasarkan penjelasan dan data dukung, pengelolaan Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK) yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Pengelolaan manajemen aset TIK dimulai dari proses perencanaan yang	Agar dapat menggambarkan perencanaan tentang penerapan manajemen Aset TIK, maka: 1. Jelaskan tentang Manajemen Aset/BMN yang tertera pada Renstra khususnya halaman 50, 60. 2. Jelaskan KAK pada Layanan Manajemen BMN. 3. Jelaskan kegiatan pada tataran implementatif yang tertera di RKA-KL tentang

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
				<p>dituangkan dalam Dokumen Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2020 (RK BMN 2020) yang memuat rencana kebutuhan BMN TIK (rencana pengadaan dan pemeliharaan) sebagaimana terlampir pada file Indikator-24-a-RKBMN.rar pada file 13 PENGADAAN RKBMN 2020.pdf, namun Rencana BMN yang disajikan yaitu Bangunan dan Kendaraan bermotor yang kurang berkaitan dengan SPBE, Dokumen yang dilampirkan pada dukung Indikator-24-a-RKBMN.rar belum terdokumentasi secara formal tanpa disertai Tanda tangan dan stempel instansi. Selain itu belum tampak adanya perencanaan (master plan, renstra, atau peta rencana) mengenai kegiatan manajemen SPBE khususnya Aset TIK.</p>	<p>Layanan Manajemen Aset TIK yaitu halaman 75 dan 83</p>
25.	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1	Surat perintah Training No. Sprin-35/SI.02/2020 perihal Training Sistem Informasi yang meliputi : Training Multimedia,	Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, serta hasil harmonisasi SPBE, maka dokumentasi penerapan Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya	<p>Agar dapat menggambarkan perencanaan tentang kompetensi SDM maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tentang Manajemen SDM yang tertera pada Rentra

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
			Training Programmer, Training Cisco.	Manusia di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional telah melakukan kegiatan pengembangan SDM untuk memenuhi kompetensi di bidang Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, namun belum mencakup kompetensi bidang proses bisnis Pemerintahan, dan infrastruktur SPBE. Namun dalam rangka pemenuhan pengembangan SDM ini, belum ada perencanaan (master plan, renstra, peta rencana) kegiatan manajemen SPBE khususnya Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia.	<p>khususnya halaman 42, 43 dan 60.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jelaskan KAK pada Layanan Manajemen SDM 3. Jelaskan kegiatan pada tataran implementatif yang tertera di RKA-KL tentang Layanan Manajemen SDM 4. Lampiri dengan Surat perintah training
26.	Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	https://www.wantannas.go.id/manajemen-pengetahuan/	Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, Halaman website yang ditampilkan hanya menampilkan informasi umum mengenai SPBE di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional belum menerapkan kegiatan. Halaman website belum menunjukkan suatu halaman aplikasi dan belum ada dokumen mengenai penerapan manajemen	Perlu sosialisasi terlebih dahulu dari K/L terkait sebagai langkah awal untuk memahami lebih detail mengenai Manajemen Pengetahuan dan rencana implementasinya.

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
				pengetahuan yang dilampirkan. oleh karena itu Penerapan Manajemen Pengetahuan di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional belum menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana	
27.	Penerapan Manajemen Perubahan	1	Keputusan Sesjen Wantannas No 33 Tahun 2020 tentang Penunjukan Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Berdasarkan penjelasan dan data dukung, Setjen Dewan Ketahanan Nasional Belum terdapat perencanaan (master plan, renstra, peta rencana) kegiatan manajemen khususnya pada Penerapan Manajemen Perubahan	Perlu sosialisasi terlebih dahulu dari K/L terkait sebagai langkah awal untuk memahami lebih detail mengenai Manajemen Perubahan dan strategi implementasinya.
28.	Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	Surat Keputusan Sesjen Wantannas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tim Pengelola Website	Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, serta hasil harmonisasi SPBE, maka dokumentasi penerapan Manajemen Layanan SPBE di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional belum terdapat perencanaan (master plan, renstra, peta rencana) pada kegiatan manajemen khususnya manajemen layanan SPBE	Perlu sosialisasi terlebih dahulu dari K/L terkait sebagai langkah awal untuk memahami lebih detail mengenai Manajemen Layanan SPBE dan strategi implementasinya.

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
29.	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	Dokumen kajian maturitas tata kelola teknologi informasi	Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka dokumentasi Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE pada Dewan Ketahanan Nasional telah melakukan proses pengukuran maturitas tata kelola teknologi informasi, namun belum mencakup audit infrastruktur SPBE pada lingkungan Dewan Ketahanan Nasional.	Menyelenggarakan audit Infrastruktur SPBE secara internal dengan tahapan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Audit Internal yang berisi obyek audit, personil Auditor Internal, personil Auditee Internal, beserta tugas pokoknya. 2. Mengirimkan permohonan ke BRIN melalui email : layanan.auditspbe@bppt.go.id 3. Melakukan prosedur Audit sesuai Audit Tools dari BRIN 4. Membuat laporan hasil Audit
30.	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	Dokumen kajian maturitas tata kelola teknologi informasi	Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka dokumentasi Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE pada Dewan Ketahanan Nasional telah melakukan proses pengukuran maturitas tata kelola teknologi informasi, namun belum mencakup audit aplikasi SPBE pada lingkungan Dewan Ketahanan Nasional.	Menyelenggarakan audit Aplikasi SPBE secara internal dengan tahapan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Audit Internal yang berisi obyek audit, personil Auditor, personil Auditee, beserta tugas pokoknya. 2. Mengirimkan permohonan ke BRIN melalui email : layanan.auditspbe@bppt.go.id

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
					3. Melakukan prosedur Audit sesuai Audit Tools dari BRIN 4. Membuat laporan hasil Audit
31.	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	Dokumen kajian maturitas tata kelola teknologi informasi	Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka dokumentasi Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE pada Dewan Ketahanan Nasional telah melakukan proses pengukuran maturitas tata kelola teknologi informasi, namun belum mencakup audit Keamanan SPBE pada lingkungan Dewan Ketahanan Nasional.	Menyelenggarakan audit Keamanan SPBE secara internal dengan tahapan: 1. Menerbitkan SK Audit Internal yang berisi obyek audit, personil Auditor, personil Auditee, beserta tugas pokoknya. 2. Mengirimkan permohonan ke BSSN 3. Melakukan prosedur Audit 4. Membuat laporan hasil Audit
32.	Layanan Perencanaan	4	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Krisna • SAKIP 	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	<i>Masih cukup relevan</i>
33.	Layanan Penganggaran	4	<ul style="list-style-type: none"> • SAKTI 	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	<i>Masih cukup relevan</i>
34.	Layanan Keuangan	3	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Aplikasi Satker (SAS) • E-SPM • SAIBA • E-Renkon-LK 	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	<i>Masih cukup relevan</i>

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
			<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri Cash Management 		
35.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi LPSE • Skep LPSE • 12 SOP LPSE • SIRUP 	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	<i>Masih cukup relevan</i>
36.	Layanan Kepegawaian	3	<ul style="list-style-type: none"> • SAPK • SIDIK 	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	<i>Masih cukup relevan</i>
37.	Layanan Kearsipan Dinamis	3	<ul style="list-style-type: none"> • SRIKANDI 	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	<i>Masih cukup relevan</i>
38.	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4	<ul style="list-style-type: none"> • SIMAK-BMN • SIMAN 	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	<i>Masih cukup relevan</i>
39.	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1	Sistem Informasi Pengawasan Internal	Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, bahwa layanan Pengawasan Internal Pemerintah di lingkungan Setjen Wantannas secara elektronik telah dapat diakses pada laman wasint.wantannas.com, namun saat dicoba untuk diakses tidak dapat terbuka dengan baik.	Saat ini Sistem Informasi Pengawasan Internal sudah dapat diakses pada URL : wasint.wantannas.go.id Oleh karena itu dapat di screenshot muatan aplikasi tersebut
40.	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3	<ul style="list-style-type: none"> • E-Monev • SMART DJA 	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	<i>Masih cukup relevan</i>

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
41.	Layanan Kinerja Pegawai	3	Aplikasi SIDIK	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	<i>Masih cukup relevan</i>
42.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	Aplikasi LAPOR	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	<i>Masih cukup relevan</i>
43.	Layanan Data Terbuka	2	Screenshot website Wantannas	Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, serta hasil harmonisasi SPBE, maka penerapan Layanan Data Terbuka telah memenuhi sampai dengan kapabilitas fungsi interaksi, yang diilustrasikan melalui adanya Publikasi data-data tersebut antara lain Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Laporan AKIP, dsb yang masih bersifat satu arah dalam menyajikan data. namun sistem yang ada belum dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan atau validasi data	Dapat diganti/dicari dengan aplikasi lain yang tidak hanya bersifat publikasi, namun juga interaksi dan transaksi.
44.	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2	Screenshot tentang aplikasi JDIH	Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, serta hasil harmonisasi SPBE maka penerapan Layanan Layanan Jaringan Dokumentasi	Dapat dilengkapi dengan fitur <i>approval</i> dan fitur digital <i>signature</i> pada aplikasi JDIH

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI	EVIDENCE	HASIL REVIEW	STRATEGI/RENCANA AKSI
				dan Informasi Hukum (JDIH) telah memenuhi sampai dengan kapabilitas fungsi teknis interaksi, yang diilustrasikan menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh edokumen terkait data terbuka seperti dokumentasi dan informasi hukum. dari data dukung yang diberikan belum diperlihatkan fitur approval, digital signature, dsb	
45.	Layanan Publik Sektor 1	2	www.wantannas.go.id	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	Dapat diganti/dicari dengan aplikasi lain yang tidak hanya aplikasi publikasi, namun juga interaksi dan transaksi
46.	Layanan Publik Sektor 2	2	Aplikasi PPID	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	Dapat diganti/dicari dengan aplikasi lain yang tidak hanya aplikasi publikasi, namun juga interaksi dan transaksi
47.	Layanan Publik Sektor 3	2	Bela Negara - Wantannas	<i>Tidak ada review dari Evaluator</i>	Dapat diganti/dicari dengan aplikasi lain yang tidak hanya aplikasi publikasi, namun juga interaksi dan transaksi

8. Penutup

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPBE tahun 2021 di lingkungan Setjen Wantannas yang dapat dijadikan bahan evaluasi sekaligus pedoman dalam melaksanakan rencana aksi selanjutnya khususnya dalam memenuhi rekomendasi yang telah diberikan oleh evaluator eksternal dan Kementerian PANRB, sehingga indikator-indikator yang dinilai kurang dapat diperbaiki dengan melakukan aksi-aksi yang relevan dan data dukung yang sesuai.

Rencana aksi SPBE ini akan efektif jika dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama antar unit kerja dengan mengedepankan semangat kolaborasi dan keterpaduan yang konsisten dan berkesinambungan. Pelaksanaan SPBE bukanlah hanya tanggung jawab satu unit kerja saja, namun perlu dilaksanakan oleh seluruh unit kerja sehingga tujuan SPBE yaitu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dapat terlaksana secara optimal.

Jakarta, Maret 2022

Kepala Biro Perencanaan,
Organisasi dan Keuangan selaku
Ketua Tim Koordinasi SPBE
Setjen Wantannas,



Shopian
Marsekal Pertama TNI